



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Dewi Sartika No. 45 Kota Palu, Sulawesi Tengah 94121

Email : sulteng.pariwisata@gmail.com

Website : pariwisata.sultengprov.go.id





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PARIWISATA

Jalan Dewi Sartika No.45 Palu Sulawesi Tengah Kode Pos 94121

Telepon (0451) 483942 - Fax (0451) 483941

Email: sulteng.pariwisata@gmail.com Website : pariwisata.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 000.7.2.8 / 92 / Sekretariat

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran;
 - b. bahwa Tim Penyusun telah selesai mengintegrasikan, mereviu dan memfinalisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata;
 8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 100.2.1/125.1/Bappeda-G.ST/2023 tentang Penetapan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN DOKUMEN LKjIP DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025**

- PERTAMA** : Menetapkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dokumen LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan dokumen resmi pertanggungjawaban kinerja instansi selama Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Dokumen LKjIP yang telah ditetapkan ini digunakan sebagai:
- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pihak internal maupun eksternal Pemerintah Daerah;
 - Salah satu instrumen penilaian capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahan pertimbangan dalam perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
- KEEMPAT** : Dokumen LKjIP ini agar disebarluaskan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selaku instansi pembina SAKIP ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 02 Februari 2026

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun. Laporan ini pada khususnya menggambarkan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Dari hasil Evaluasi Kinerja, diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada 2025 dengan dukungan dana APBD sebesar **Rp. 17.473.623.806,89**. Dari anggaran yang tersedia tersebut dapat direalisasikan sebesar **Rp. 14.045.275.329,-** atau sebesar **80,38 %**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam upaya pengoptimalisasian kinerja sehingga sangat diperlukan koreksi / perbaikan dan penyempurnaan secara optimal dan menyeluruh pada kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepada pihak-pihak terutama kepada seluruh pejabat dan staf Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bekerjasama dalam pencapaian program kegiatan yang dilakukan tahun 2025, kami tak lupa menyampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian didalam meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme dibidang tugas masing-masing.

Palu, 31 Januari 2026



**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Dra. ELIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

SISTIMATIKA PENULISAN iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Gambaran Umum 1

 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 4

 1.3. Isu Strategis / Permasalahan..... 11

 1.4. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 ... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

 2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah 14

 2.2. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 16

 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 21

 2.4. Perjanjian Kinerja 2025 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

 3.1. Capaian Kinerja 28

 a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025..... 29

 b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025..... 30

 c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Dinas Pariwisata 33

 d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional /Provinsi Lainnya..... 34

 e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang dilakukan..... 35

 f. Analisis efisiensi sumber daya dan realisasi anggaran..... 49

 g. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja..... 51

 3.2. Realisasi Anggaran 59

BAB IV P E N U T U P 61

 4.1. Kesimpulan 61

 4.2. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja 61

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

SISTIMATIKA PENULISAN

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas keadaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025.

Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan Visi dan Misi serta muatan rencana strategis/kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025.

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH 2025

Disusun oleh :
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Dewi Sartika No.45 Palu 94121
Telp. 0451 483942 Fax. 483941
Email : sulteng.pariwisata@gmail.com
Website : www.disparekrafslteng.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 merupakan presentasi hasil pelaksanaan tugas selama 1 (tahun) yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menyajikan seluruh capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama tahun 2025. Penilaian capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan target atau rencana kerja dengan realisasinya dari indikator kinerja input, output dan outcomes.

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, yang sangat ditekankan adalah kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan program pembangunan berbasis kinerja yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, realisasi capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu : **1). PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum** dengan capaian **91,17 %** **2). Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara** dengan capaian **112,66 %** dan **3). PDRB Ekonomi Kreatif terhadap ADHB** dengan capaian **56,12%** sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat di kategorikan tinggi.

Capaian Kinerja selama tahun 2025 adalah wujud dari keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan Pariwisata. Program yang telah dicapai di tahun 2025 ini adalah (1). Peningkatan Daya Tarik Wisata, (2). Pemasaran Pariwisata, (3). Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (4). Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, (5). Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Harapan kami dengan selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah Sulawesi Tengah, khususnya dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada masa kini dan masa akan datang.

Palu, 31 Januari 2026

**KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom dibentuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepariwisataan. Dinas ini berperan sebagai motor penggerak pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berbasis pada potensi dan kearifan lokal Sulawesi Tengah.

Dinas Pariwisata merupakan perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi 2 RPJMD Tahun 2025 - 2029 yaitu **“Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan”** dalam mendukung pelaksanaan misi 2 RPJMD yang menekankan pada penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, Dinas Pariwisata memiliki peran strategis melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan destinasi dan desa wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, promosi dan pemasaran event daerah serta fasilitasi ekosistem ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Dengan langkah ini, Dinas Pariwisata berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pelestarian budaya serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang sejalan dengan visi pembangunan daerah dan program BERANI

Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencakup 9 Program yaitu : 1) Berani Cerdas, 2) Berani Sehat, 3) Berani Lancar, 4) Berani Menyala, 5) Berani Berkah, 6) Berani Makmur, 7) Berani Harmoni, 8) Berani Sejahtera, dan 9) Berani Berintegritas.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengampu urusan pada program Berani Harmoni dan memiliki peran strategis dalam mendukung dan mengimplementasikan **Program BERANI Harmoni** serta menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja yang optimal didukung oleh tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga pendukung yang ditempatkan pada berbagai bidang dan sub bagian sesuai dengan struktur organisasi, dengan kondisi kepegawaian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Jumlah Serta Susunan Personil Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Golongan Per 31 Desember 2025

PEGAWAI	JUMLAH
Golongan IV	9 Orang
Golongan III	38 Orang
Golongan II	2 Orang
P3K Golongan IX	18 Orang
P3K Golongan V	9 Orang
P3K Paruh Waktu Gol. IX	7 Orang
P3K Paruh Waktu Gol. V	20 Orang
Jumlah	103 Orang

**Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Sesuai Jabatan Per 31 Desember 2025**

Pegawai	Jumlah	
Eselon II	1	Orang
Eselon III	3	Orang
Eselon IV	1	Orang
Fungsional	8	Orang
Pelaksana	90	Orang
Jumlah	103	Orang

**Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
S2	16	Orang
S1	50	Orang
Sarjana Muda/D3	4	Orang
S L T A	33	Orang
Jumlah	103	Orang

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, selain ketersediaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana penunjang juga sangat dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut antara lain meliputi gedung perkantoran, ruang kerja pegawai, ruang rapat, peralatan komputer dan teknologi informasi, kendaraan operasional, serta perlengkapan administrasi lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun nilai asset tetap berupa sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Neraca Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 31 Desember 2025**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tanah	Rp. 11.379.180.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 6.224.446.147,-
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 37.536.361.605,06
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 2.322.350.111,10
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 229.650.000,-
6.	Aset Lainnya	Rp. 4.450.505.483,-
	Total	Rp. 62.142.493.346,16

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; .
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

A. Struktur Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Asset
- 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional

e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang

1. SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas dikepalai oleh seorang pejabat Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum.

- c. Penyiapan bahan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum.
- d. Pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga, Korpri dan umum.
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Bidang Pengembangan Destinasi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya tarik dan Pengembangan Kawasan Pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugasnya, kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.
- b. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan Destinasi pariwisata, melaksanakan kajian/penelitian pengembangan Destinasi pariwisata dan penerbitan perizinan berusaha berbasis pariwisata.
- d. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan kawasan pariwisata, koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kawasan pariwisata, melaksanakan kegiatan teknis pengembangan kawasan pariwisata meliputi

pembinaan dan penataan kawasan pariwisata unggulan dan prioritas Provinsi.

- e. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan pengembangan sadar wisata dan kerja sama antar lembaga dan masyarakat serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri, melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan teknis peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata dalam upaya pengembangan destinasi dan kawasan wisata.
- f. Penyiapan bahan kerja sama bagi pengembangan Destinasi pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan Destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata peningkatan daya tarik wisata.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata.

3. BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Bidang Pemasaran Pariwisata dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- b. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

- c. Perumusan kebijakan teknis bidang penguatan promosi, penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- e. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata.
- g. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

4. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan Bidang Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- b. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan Ekonomi Kreatif.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif.
- g. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya sektor ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak Kekayaan Intelektual.
- h. Penyiapan bahan dan data untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- i. Penyiapan bahan rumusan dan kebijakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kota kreatif, ruang kreatif, dan jaringan orang kreatif.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- k. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

5. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta

pelaporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- e. Pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- f. Pemberian bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan supervisi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- h. Melaksanakan program pelatihan dan skema uji kompetensi di bidang pengembangan standar kompetensi dan kerangka kualifikasi bidang Pariwisata.
- i. Memfasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi bidang Pariwisata, pembentukan Badan Promosi Daerah dan kerjasama antar lembaga Pariwisata dan lembaga lainnya dalam program penguatan Sumber Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- j. Pengembangan standar dan peningkatan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- l. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1.3. Isu Strategis/Permasalahan

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada dan telaahan visi dan misi pembangunan pariwisata, sasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan OPD Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek implikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda Prioritas dalam Pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah.

Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Keanekaragaman wisata bahari, alam dan budaya belum terintegrasi secara optimal;
2. Keterbatasan sarana pendukung (Bandara, pelabuhan, hotel, restoran, akses jalan);
3. Belum ada paket wisata bernilai tambah yang mendorong pusat-pusat ekonomi baru;
4. Perlunya peningkatan daya saing melalui promosi terarah, kualitas destinasi, SDM dan Investasi;
5. Pentingnya menjaga kualitas lingkungan (carrying capacity) dan kesiapsiagaan bencana di daerah wisata.

1.4. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan nilai capaian sebesar 62,45 dengan predikat B (Baik). Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini menunjukkan bahwa meskipun instansi telah memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup andal, terdapat koreksi yang sangat signifikan atas capaian sebelumnya yang sempat menyentuh angka 83,10 (Predikat A).

Penurunan drastis sebesar 20,65 poin ini mengindikasikan adanya beberapa faktor krusial yang memerlukan evaluasi mendalam. Secara analisis, penurunan ini umumnya dipicu oleh ketidakselarasan (misalignment) antara perencanaan strategis dengan implementasi anggaran, serta melemahnya akuntabilitas kinerja akibat sistem pengukuran yang belum terinternalisasi dengan kuat hingga ke level eselon bawah atau pelaksana. Selain itu, adanya

perubahan instrumen atau parameter penilaian SAKIP yang jauh lebih ketat dari tim evaluator juga menjadi faktor eksternal yang mengekspos celah dalam validitas data capaian kinerja dan kualitas dokumen pelaporan yang disajikan.

Penurunan ini menjadi alarm penting bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh (corrective action), terutama dalam memperkuat komitmen pimpinan, mempertajam indikator kinerja utama (IKU), serta memastikan bahwa orientasi hasil kerja benar-benar terwujud secara nyata, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif. dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

- 1. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 17,10
- 2. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 15,60
- 3. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10,50
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,25

Dari hasil evaluasi tersebut, masih terdapat permasalahan yang harus ditindak lanjuti dengan melakukan beberapa perbaikan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1.	Menyelaraskan IKU beserta penjelasan formulasi setiap IKU serta sasaran pada PK dan LKjIP yang disesuaikan dengan Renstra;	Bukti Desk Hasil Rakortekrenbang Dokumen penjelasan formulasi perhitungan setiap Indikator Kinerja Utama (IKU);	https://drive.google.com/file/d/11uX6DgYpYTEbJ6VEzkmUWYblO-kVpK-4/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1HTbZveQDKeKqOgm4V7trV3uqM1PoAdvn/view?usp=drive_link
2.	Menyamakan target IKU pada Renstra, PK dan LkjIP;	Bukti Desk Hasil Rakortekrenbang dan Penjelasan penyebab tidak sinkronnya 1 (satu) Indikator Kinerja Utama antara Renstra, PK dan Lkj : IKU Nilai Tambah Sektor Pariwisata di ubah menjadi Rasio PDRB Pariwisata sesuai hasil Desk Urusan	https://drive.google.com/file/d/11uX6DgYpYTEbJ6VEzkmUWYblO-kVpK-4/view?usp=drive_link

		Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) antara Pemerintah Pusat (Ditjen Bangda Kemendagri, Bappenas, Kemenparekraf) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Bappeda dan Dinas Pariwisata) yang dilaksanakan di Surabaya pada Tahun 2024. Perubahan ini yang menyebabkan tidak sinkronnya antara IKU yang terdapat di Renstra (yang dibuat pada tahun 2021) dan PK/LKj Tahun 2024 (bukti hasil Desk terlampir);	
3.	Memastikan dalam Laporan Kinerja bahan sumber data yang digunakan harus jelas;	Bukti dokumen Analisis kunjungan pariwisata di Sulawesi Tengah;	https://drive.google.com/file/d/1_acVloaFmRe2v8StEfOHdfDbu_wqMn4oZ/view?usp=drive_link
4.	Menyelaraskan kembali isu-isu strategis dengan dokumen Renstra;	Dokumen (halaman) isu-isu strategis sesuai dokumen Renstra dan LKj;	https://drive.google.com/file/d/1OjMo_ikGgAxpABZkZJwib7R-lugpcagJ/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1AMO_YPlib-uNFWqy5GaS-xrzqsuuc94G/view?usp=drive_link
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja;	Bukti screnshoot Aplikasi e-SAKIP REVIU/esrmenpan.go.id dan kedepannya mengintensifkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengukur capaian kinerja;	https://drive.google.com/file/d/1EJqf9kVeWbdzJ_aDQ7kjjOjvJybOxpb/view?usp=drive_link
6.	Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan membuat Berita Acara Hasil Tindak Lanjut hasil rekomendasi LHE APIP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Akan membuat Berita Acara Hasil Tindak Lanjut setelah LHE APIP diterima.	https://drive.google.com/file/d/1RwkVjwr3DIWuMVJtd6bKnwYm_FHIVkSr/view?usp=drive_link

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam dokumen **Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2021-2026** Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai **tujuan strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian Daerah**. Tujuan ini yang akan mengarahkan perumusan sasaran, program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan **Misi 3 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan** dengan **sasaran strategisnya adalah Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata, Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif**.

Di tahun 2024 terdapat perubahan pada 1 (satu) sasaran strategis dan indikator kinerja yaitu pada indikator **Nilai Tambah Sektor Pariwisata** yang berubah menjadi **Rasio PDRB Pariwisata** yang satuan indikatornya adalah persentase (%) sesuai dengan berita acara hasil pembahasan Desk Rakortekrenbang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya di **tahun 2025**, adalah masa transisi peralihan dari periode Renstra sebelumnya (2021-2026) ke periode Renstra berikutnya (2025-2029) kembali dilakukan perubahan pada semua sasaran strategis dan indikator kinerjanya, sesuai berita acara hasil pembahasan Desk Rakortekrenbang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang berubah itu adalah indikator **Rasio PDRB Pariwisata** dirubah menjadi **Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** dengan satuan indikator persentase (%). Kemudian **Indikator Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara** menjadi **Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara** satuan ribu orang dan indikator **Nilai Tambah Ekonomi Kreatif** menjadi **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB** dengan satuan indikator persentase (%).

Ketiga indikator kinerja tersebut yang kemudian dituangkan kembali ke dalam dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2025-2029** dengan tujuan strategis adalah **Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** dan mengampu pada **Misi 2 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.**

Sebagai perbandingan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Renstra periode 2021-2026 (Tabel 4.1) dan Renstra periode 2025-2029 (Tabel 3.3) disertai dengan targetnya masing-masing, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Persentase	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
		Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	2.100.622	2.310.684	2.426.218	2.547.529	2.668.840
		Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Persentase	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETE RANG AN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah											
- MENINGKATKAN PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,32	0,34	0,37	0,40	0,42	0,45	0,48	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB (%)	-	3,76	3,84	3,93	4,01	4,10	4,18	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Daya Dukung Usaha Jasa Pariwisata Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,32	0,34	0,37	0,40	0,42	0,45	0,48	
		Meningkatnya Daya Saing dan Perluasan Jaringan Pemasaran Destinasi Pariwisata Unggulan	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	23.973	25.000	28.750	33.000	38.000	43.700	50.300	
		Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing Berkualitas Kekayaan Intelektual	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB (%)	0,00	3,76	3,84	3,93	4,01	4,10	4,18	

2.2. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan disusun sebagai bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan program dan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah serta dirancang untuk mendorong pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip **efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan sinkronisasi** dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan nasional.

Pada Tahun 2025, struktur program dan kegiatan Dinas Pariwisata terdiri atas beberapa **program** utama yang dijabarkan lebih lanjut ke

dalam **kegiatan** dan **sub kegiatan** sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO.	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1.	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 1.725.887.100	Rp 1.792.365.823	Rp 66.478.723
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp 243.735.600	Rp 377.702.000	Rp 133.966.400
		Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp 243.735.600	Rp 377.702.000	Rp 133.966.400
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 775.465.000	Rp 738.491.299	-Rp 36.973.702
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 724.340.000	Rp 735.891.298,50	Rp 11.551.298,50
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 51.125.000	Rp 2.600.000	-Rp 48.525.000
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 706.686.500	Rp 676.172.524	-Rp 30.513.976
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 166.999.999,99	Rp 349.392.524	Rp 182.392.524
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 387.841.500,03	Rp 214.103.000,02	-Rp 173.738.500,01
		Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Rp 151.845.000,00	Rp 112.677.000,00	-Rp 39.168.000,00
2.	Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	PEMASARAN PARIWISATA	Rp 927.948.750	Rp 1.478.221.150	Rp 550.272.400
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 927.948.750	Rp 1.478.221.150	Rp 550.272.400
		Penguatan Promosi Melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Rp 223.438.750	Rp 479.279.350	Rp 255.840.600
		Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Rp 704.510.000	Rp 998.941.800	Rp 294.431.800

3.	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp 465.286.000	Rp 1.257.772.122	Rp 792.486.122
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp 295.976.000	Rp 1.213.902.122	Rp 917.926.122
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Rp 20.506.000	Rp 1.025.727.320	Rp 1.005.221.320
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi Usaha Pemula	Rp 33.324.000	Rp 1.830.000	-Rp 31.494.000
		Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Rp 242.146.000	Rp 186.344.802	-Rp 55.801.198
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp 169.310.000	Rp 43.870.000	-Rp 125.440.000
		Perlindungan Hasil Kreatifitas	Rp 90.000.000	Rp 34.870.000	-Rp 55.130.000
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Rp 79.310.000	Rp 9.000.000	-Rp 70.310.000
		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 1.250.200.000	Rp 989.472.775	-Rp 260.727.225
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp 481.053.930	Rp 401.889.467	-Rp 79.164.463
		Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	Rp 178.640.310	Rp 21.801.000	-Rp 156.839.310
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Rp 302.413.620	Rp 380.088.467	Rp 77.674.847
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp 769.146.070	Rp 587.583.308	-Rp 181.562.762
		Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Rp 593.026.905	Rp 443.576.905	-Rp 149.450.000
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Rp 176.119.165	Rp 144.006.403	-Rp 32.112.762

4. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp	12.195.967.454	Rp	11.955.791.937	-Rp	240.175.517
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	291.030.077	Rp	477.974.850	Rp	186.944.773
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	291.030.076,98	Rp	477.974.850	Rp	186.944.773,02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	8.515.989.304	Rp	8.455.558.278	-Rp	60.431.026
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	8.248.289.304	Rp	8.167.073.278	-Rp	81.216.025,90
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	136.080.000	Rp	130.080.000	-Rp	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	131.620.000	Rp	158.405.000	Rp	26.785.000
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp	137.287.000	Rp	107.507.500	-Rp	29.779.500
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	137.287.000	Rp	107.507.500	-Rp	29.779.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	139.115.000	Rp	128.311.000	-Rp	10.804.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	60.375.000	Rp	59.800.000	-Rp	575.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp	72.300.000	Rp	65.911.000	-Rp	6.389.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	6.440.000	Rp	2.600.000	-Rp	3.840.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	356.827.023	Rp	232.697.370	-Rp	124.129.653
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	5.000.140	Rp	12.481.300	Rp	7.481.160
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	70.567.928	Rp	80.427.730	Rp	9.859.802

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	31.232.974	Rp	23.411.349,97	-Rp	7.821.624,03
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	250.025.981	Rp	116.376.990	-Rp	133.648.991
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	162.191.000	Rp	52.496.600	-Rp	109.694.400
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	33.862.000	Rp	-	-Rp	33.862.000
	Pengadaan Mebel	Rp	26.845.000	Rp	32.303.600	Rp	5.458.600
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	101.484.000	Rp	20.193.000	-Rp	81.291.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.070.466.250	Rp	1.760.791.875	-Rp	309.674.375
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	258.620.000	Rp	269.835.000	Rp	11.215.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.811.846.250	Rp	1.490.956.875	-Rp	320.889.375
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	523.061.800	Rp	740.454.464	Rp	217.392.664
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	257.307.700	Rp	236.565.850	-Rp	20.741.850
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	10.330.000	Rp	34.330.000	Rp	24.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	255.424.100	Rp	469.558.614,30	Rp	214.134.514,30
J U M L A H		Rp	16.565.289.304,00	Rp	17.473.623.806,89	Rp	908.334.502,89

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator Kinerja mempunyai tujuan dan sasaran yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara berkelanjutan (*suistenable*) dan memiliki ukuran secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra). Pada periode Renstra 2021–2026, fokus indikator kinerja utama masih diarahkan pada pemulihan dan penguatan sektor pariwisata, khususnya dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan destinasi wisata prioritas, serta peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah.

Penetapan IKU pada perangkat daerah mengacu pada dokumen perencanaan strategis organisasi serta kebijakan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang dikelola melalui aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). IKU dirancang agar mampu mencerminkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dalam Laporan Kinerja perangkat daerah, IKU berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah. Setiap indikator dilengkapi dengan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, serta realisasi capaian yang diperoleh pada akhir periode pelaporan. Melalui perbandingan antara target dan realisasi tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, IKU juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, kinerja organisasi dapat dievaluasi secara objektif sehingga menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan, perencanaan program, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Memasuki periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan mengalami penguatan menuju pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kualitas. IKU tidak hanya menitikberatkan

pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah ekonomi, daya saing destinasi, kualitas pengalaman wisatawan, serta kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada Renstra 2025–2029 indikator kinerja juga mulai mengintegrasikan aspek ekonomi kreatif secara lebih terukur, antara lain melalui indikator nilai tambah ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha kreatif, serta penguatan ekosistem industri kreatif daerah. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan sinergi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berfokus pada 3 (tiga) **Indikator Kinerja Utama yaitu 1) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 3) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB** yang diampu pada 4 bidang sebagaimana penjelasan berikut:

1. **Indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum**, capaiannya dihitung dari PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum dibagi Total PDRB ADHB dikalikan 100 %. Dengan formulasi :

$$R = \frac{PDRB_{Pariwisata}}{PDRB_{Total\ ADHB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- R : Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)
- $PDRB_{Pariwisata}$: Nilai nominal PDRB gabungan sektor akomodasi dan makan minum (dalam miliar)
- $PDRB_{TotalADHB}$: Nilai nominal total PDRB seluruh kategori lapangan usaha di Sulawesi Tengah (dalam miliar)

Indikator ini mengukur kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan nilai tambah bruto sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Indikator ini digunakan sebagai proksi untuk melihat peranan sektor pariwisata inti dalam struktur ekonomi daerah, mengingat

aktivitas akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman merupakan komponen utama dalam aktivitas pariwisata.

Data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini merupakan data sekunder resmi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

- a) Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
- b) Berita Resmi Statistik (BRS) Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
- c) Publikasi Statistik Perhotelan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai data pendukung

Interpretasi atas indikator ini Adalah Nilai rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat mengindikasikan peningkatan aktivitas pariwisata dan berkembangnya industri jasa pariwisata di wilayah tersebut. Sebaliknya, nilai rasio yang relatif rendah menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih memiliki kontribusi yang terbatas terhadap struktur ekonomi daerah.

2. Indikator Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara, Indikator ini mengukur jumlah kedatangan wisatawan mancanegara yang tercatat menggunakan fasilitas akomodasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu tahun kalender. Formulasi perhitungan adalah :

$$C = \sum (Ai + Bi)$$

Keterangan:

- C : jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (ribu orang)
- A_i : jumlah kedatangan wisatawan mancanegara pada akomodasi berbintang
- B_i : jumlah kedatangan wisatawan mancanegara pada akomodasi non-berbintang

Penghitungan indikator dilakukan dengan metode akumulasi kedatangan dari seluruh sarana akomodasi maupun destinasi wisata yang merupakan bagian unit pelaporan. Setiap aktivitas check-in wisatawan mancanegara dihitung sebagai satu unit kedatangan. Apabila wisatawan berpindah akomodasi, maka

aktivitas check-in tersebut tetap dicatat sebagai kedatangan baru karena setiap aktivitas menginap menghasilkan pemanfaatan layanan pariwisata yang berbeda. Interpretasinya Semakin tinggi jumlah kedatangan wisatawan mancanegara menunjukkan meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata serta meningkatnya aktivitas pariwisata di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

- 3. Indikator Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB**, Indikator ini mengukur seberapa besar kontribusi aktivitas ekonomi kreatif dalam membentuk nilai tambah perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Secara ideal, pengukuran indikator ini memerlukan data nilai tambah ekonomi kreatif pada tingkat regional. Namun demikian, hingga saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) belum mempublikasikan data nilai tambah sektor ekonomi kreatif secara terpisah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga data tersebut tidak secara langsung dapat diolah dan dijadikan sebagai sumber pengukuran langsung. Menghadapi keterbatasan data tersebut, indikator ini disusun dengan menggunakan pendekatan proksi melalui ekstraksi sektoral terhadap data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi lapangan usaha dalam struktur PDRB yang memiliki keterkaitan substansial dengan 17 subsektor ekonomi kreatif sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf), kemudian mengekstraksi proporsi nilai tambah ekonomi kreatif dari setiap lapangan usaha tersebut menggunakan koefisien alpha (α). Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (NTEK) yang dihasilkan dari proses ekstraksi ini selanjutnya dijadikan sebagai proksi dalam menghitung kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah. Aktivitas ekonomi kreatif mencakup subsektor yang memiliki karakteristik berbasis kreativitas, desain, inovasi, serta produksi karya intelektual. Subsektor tersebut tersebar pada berbagai kategori lapangan usaha dalam struktur PDRB. Pemilihan lapangan usaha sebagai proxy NTEK beserta keterkaitan subsektor ekraf dan dasar penetapan koefisien alpha disajikan secara rinci pada Tabel berikut ini

Kode Data BPS	Lapangan Usaha PDRB	Subsektor Ekraf	Koefisien	Justifikasi Penentuan besaran α
C.2	Industri Pengolahan – Industri Makanan dan Minuman	Kuliner	0,75	Struktur industri makanan dan minuman Sulawesi Tengah diestimasi terdiri dari tiga komponen: (1) pengolahan produk pangan khas berbasis bahan baku lokal seperti kakao olahan, kopi specialty, sagu, dan hasil laut yang seluruhnya masuk ekraf (~55%); (2) industri makanan ringan dan minuman kemasan skala UMKM dengan muatan identitas lokal (~20%); dan (3) pengolahan komoditas pangan massal seperti kopra dan minyak kelapa yang tidak mengandung unsur kreasi (~25%). Total komponen ekraf: 55% + 20% = α = 0,75.
C.4	Industri Pengolahan – Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Fesyen	0,85	Sektor ini terdiri dari: (1) tenun tradisional seperti Subi dan Buya Bomba serta batik bermotif lokal yang seluruhnya merupakan produk Fesyen ekraf (~75%); (2) konveksi pakaian dengan sentuhan desain lokal yang sebagian masuk ekraf (~10%); dan (3) Industri tekstil hulu tanpa sentuhan kreatif (~15%). Total komponen ekraf: 75% + 10% = α = 0,85.
C.5	Industri Pengolahan – Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	Fesyen, Kriya	0,50	Sektor ini diestimasi terdiri dari: (1) kerajinan tas, dompet, dan alas kaki custom bernilai kreatif yang masuk subsektor Fesyen dan Kriya (~50%); dan (2) produksi barang kulit konvensional tanpa elemen desain (~50%). Proporsi ini diestimasi berdasarkan pertimbangan belum berkembangnya industri kulit kreatif secara dominan di Sulawesi Tengah, menghasilkan α = 0,50
C.6	Industri Pengolahan – Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	Kriya	0,90	Sektor ini diestimasi terdiri dari: (1) kerajinan ukir kayu eboni Poso dan produk anyaman rotan Morowali untuk pasar ekspor dan lokal, seluruhnya masuk Kriya ekraf (~75%); (2) kerajinan bambu dan gabus skala UMKM untuk dekorasi dan rumah tangga (~15%); dan (3) pengolahan kayu dasar untuk konstruksi dan veneer ekspor yang tidak tergolong ekraf (~10%). Total komponen ekraf: 75% + 15% = α = 0,90.
C.7	Industri Pengolahan – Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	Penerbitan, Desain Komunikasi Visual	0,70	Sektor ini terdiri dari: (1) jasa percetakan kreatif, penerbitan buku/majalah lokal, dan desain grafis komersial yang masuk subsektor Penerbitan dan DKV (~50%); (2) reproduksi media rekaman (musik, film) yang masuk ekraf (~20%); dan (3) produksi kertas dasar, kemasan, dan barang kertas industri yang tidak tergolong ekraf (~30%). Total komponen ekraf: 50% + 20% = α = 0,70.
C.15	Industri Pengolahan – Industri Furnitur	Desain Produk, Kriya	0,90	Jenis produk yang dominan, sektor furnitur Sulawesi Tengah terdiri dari: (1) furnitur ukir

				berbasis kayu eboni dan rotan dengan nilai desain dan kerajinan sebagai daya jual utama, masuk subsektor Desain Produk dan Kriya (~80%); (2) furnitur rotan desain modern untuk pasar ekspor yang memiliki elemen desain (~10%); dan (3) furnitur rakitan standar tanpa elemen desain kreatif (~10%). Total komponen ekraf: $80\% + 10\% = \alpha = 0,90$.
I.2	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum–Penyediaan Makan Minum	Kuliner	0,80	Estimasi unit usaha sektor penyediaan makan minum Sulawesi Tengah terdiri dari: (1) restoran dan kafe yang secara eksplisit mengangkat kuliner khas daerah (kaledo, uta dada, sup ikan) dengan konsep dan presentasi kreatif (~55%); (2) warung makan berbasis masakan lokal dengan resep turun-temurun yang memiliki identitas budaya (~25%); dan (3) katering massal, kantin, dan warung konvensional tanpa muatan kreatif (~20%). Total unit usaha ekraf: $55\% + 25\% = \alpha = 0,80$.
J	Informasi dan Komunikasi	Aplikasi & Pengembangan Permainan, Televisi dan Radio, Film/Animasi/Video, Periklanan	0,45	Nilai tambah sektor ini diestimasi berasal dari: (1) jasa telekomunikasi — operator seluler dan penyedia internet — yang tidak tergolong ekraf (~55%); (2) aktivitas penyiaran TV dan radio lokal serta produksi konten media yang masuk ekraf (~20%); (3) pengembangan aplikasi, konten digital, dan jasa periklanan berbasis internet (~15%); dan (4) jasa teknologi informasi lainnya yang mendukung aktivitas ekraf (~10%). Total komponen ekraf: $20\% + 15\% + 10\% = \alpha = 0,45$.
M,N	Jasa Perusahaan	Periklanan, Arsitektur, Desain Interior, Desain Produk, Fotografi	0,45	Aktivitas jasa perusahaan di Sulawesi Tengah diasumsikan terdiri dari: (1) jasa non-kreatif seperti konsultansi hukum, akuntansi, dan administrasi bisnis (~55%); (2) jasa periklanan dan branding untuk produk UMKM lokal (~20%); (3) jasa arsitektur, desain interior, dan desain produk (~15%); dan (4) jasa fotografi profesional untuk event, wisata, dan komersial (~10%). Total komponen ekraf: $20\% + 15\% + 10\% = \alpha = 0,45$.
R,S,T, U	Jasa Lainnya	Seni Pertunjukan, Seni Rupa, Musik	0,60	Berdasarkan estimasi unit usaha dan aktivitas, kategori ini terdiri dari: (1) jasa non-kreatif seperti reparasi barang, laundry, dan jasa personal care (~40%); (2) sanggar seni, kelompok musik tradisional, dan jasa seni pertunjukan untuk event budaya dan pariwisata (~35%); dan (3) galeri seni rupa, kegiatan festival budaya, dan jasa kreatif berbasis komunitas (~25%). Total komponen ekraf: $35\% + 25\% = \alpha = 0,60$.

Data yang digunakan bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan Berita Resmi Statistik (BRS) pertumbuhan ekonomi. Perhitungan indikator dilakukan melalui pendekatan ekstraksi sektoral, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi kategori lapangan usaha yang berkaitan dengan subsektor ekonomi kreatif.
- b) Menentukan koefisien (alpha) kontribusi ekonomi kreatif pada setiap kategori lapangan usaha.
- c) Mengalikan nilai PDRB pada masing-masing kategori dengan koefisien kontribusi tersebut.
- d) Menjumlahkan seluruh nilai hasil ekstraksi untuk memperoleh total nilai tambah ekonomi kreatif.
- e) Menghitung rasio kontribusi NTEK terhadap PDRB total

Dengan formulasi perhitungan adalah

$$KEK = \frac{PDRB_{Ekraf}}{PDRB_{Total}} \times 100\%$$

Keterangan:

- KEK : Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)
- PDRB Ekraf : Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Miliar)
- PDRB : Nilai Nominal PDRB ADKG (Miliar)

Interpretasinya adalah Nilai indikator yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah.

Pengukuran indikator menggunakan pendekatan estimasi melalui koefisien kontribusi ekonomi kreatif. Oleh karena itu, hasil penghitungan merupakan pendekatan yang menggambarkan besaran nilai tambah ekonomi kreatif secara agregat

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum	1. Jumlah PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dibagi Total PDRB ADHB dikali 100%. $\frac{\text{PDRB Penyediaan Akmamin}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100\%$	BPS	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	2. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun n	BPS dan Dinas Pariwisata Kab/Kota	Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB	3. Jumlah PDRB Ekonomi Kreatif dibagi Total PDRB ADHB dikali 100%. $\frac{\text{PDRB Ekonomi Kreatif}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100\%$	BPS	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja yang dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Target kinerja tersebut kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan yang mendukung pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan pemasaran pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta penguatan ekonomi kreatif di daerah.seperti yang dapat dilihat pada lampiran berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**

Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

H. RUSDY MASTURA

Pihak Pertama,

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,34 %
2.	Meningkatnya Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	25.000 Perjalanan
3.	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	3,76 %

Program :	Anggaran:	Keterangan:
I. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 1.725.887.100,02	APBD
II. Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 927.948.750	APBD
III. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 465.286.000	APBD
IV. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 1.250.200.000	APBD

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

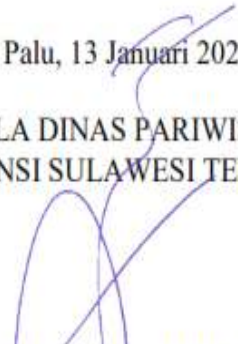


H. RUSDY MASTURA



Palu, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

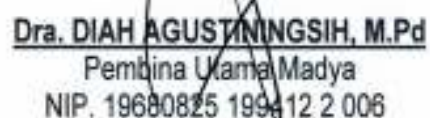
Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



ANWAR HAFID

Palu, 15 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,34 %
2.	Meningkatnya Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	25.000 Perjalanan
3.	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	3,76 %

PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 1.205.490.300,17	APBD
2 Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 726.025.950,00	APBD
3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 281.469.122,00	APBD
4 Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 679.472.775,00	APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Palu, 15 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2025

3.1 A. Capaian Kinerja

Secara umum, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memenuhi tugas dan fungsinya yang diwujudkan dengan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja. Pada Renstra periode tahun 2021-2026 dan Renstra periode tahun 2025-2029, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan masing-masing 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja. Indikator kinerja pada periode akhir Renstra sebelumnya (2021-2026) masih tetap digunakan sebagai indikator kinerja pada periode awal Renstra yang baru (2025-2029). Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi dalam pengukuran kinerja perangkat daerah, sehingga capaian kinerja dapat dipantau secara berkelanjutan dari satu periode perencanaan ke periode berikutnya.

Kesamaan indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa fokus pembangunan dan arah kebijakan pada sektor terkait masih relevan dan menjadi prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan menggunakan indikator yang sama, perangkat daerah dapat melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada akhir periode Renstra sebelumnya sekaligus menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan target kinerja pada awal periode Renstra yang baru. Meskipun indikator kinerja yang digunakan tetap sama, penetapan target pada periode Renstra yang baru disesuaikan dengan kondisi aktual, potensi daerah, serta kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, kesinambungan indikator kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan secara lebih terukur dan akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran. Langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi untuk masing-masing komponen sasaran sehingga diperoleh capaian tiap komponen dengan rata-rata seluruh sasaran.

Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal dan internal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis capaian masing-masing sasaran seperti yang telah ditetapkan Renstra tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	0,34	0,31	91,17
2.	Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	25.000	28.165	112,66
3.	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	3,76	3,20	85,02

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa pada persentase tingkat capaian kinerja indikator **Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum** sebesar **91,17%** dikategorikan **Sangat Tinggi**. Kemudian pada indikator **Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara** dengan capaian sebesar **112,66 %** juga **dikategorikan Istimewa** karena melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja. Begitu juga pada indikator **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB**, capaian realisasinya adalah sebesar **85,02 %** mendapat kategori **Tinggi**. Kategori penilaian ini sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 hal 495 sebagai berikut :

Tabel T E.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk masing-masing sasaran tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi kerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Di tahun 2025, sesuai hasil pembahasan Desk Rakortekrenbang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang kemudian dituangkan ke dalam Renstra Dinas Pariwisata tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 3 indikator yaitu indikator **Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum** dengan satuan indikator persentase (%) yang hasil realisasinya adalah **0,31%** dengan capaian sebesar **91,17 %** dari target **0,34 %** yang telah ditetapkan.

Kemudian indikator **Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara**, sesuai hasil pembahasan pada Desk Rakortekrenbang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dituangkan ke dalam Renstra Dinas Pariwisata tahun 2025-2029, dengan hasil realisasinya adalah sebanyak **28.165** orang dengan capaian sebesar **112,66 %** dari target **25.000 orang** yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya indikator **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB** yang hasil realisasinya adalah **3,20 %** dengan capaian sebesar **85,02%** dari target yang ditetapkan sebesar **3,76 %**. Sektor Ekonomi Kreatif ini terdiri dari 17 sub sektor sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Perpres Nomor 96 Tahun 2019 yaitu :

1. Pengembang Permainan (Game Developer)
2. Arsitektur
3. Desain Interior
4. Musik
5. Seni Rupa
6. Desain Produk
7. Fashion
8. Kuliner

9. Film, Animasi dan Video
10. Fotografi
11. Desain Komunikasi Visual (DKV)
12. Televisi dan Radio
13. Kriya (Kerajinan)
14. Periklanan
15. Seni Pertunjukan
16. Penerbitan
17. Aplikasi

Pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan akses permodalan, kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif, serta masih terbatasnya akses pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak melalui pembinaan, pelatihan, fasilitasi promosi, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif agar subsektor ekonomi kreatif dapat berkembang secara optimal.

Dengan potensi sumber daya budaya dan kreativitas masyarakat yang dimiliki, ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya target, realisasi dan capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 - 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

3.1.1.B Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025											
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata (Rp)	1.100.000.000.000	1.228.210.200.000	111,65%	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Org)	1.323.098	5.139.979	388,48%	5.500.000	9.216.929	167,58%	-	-	-
3	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp.)	55.000.000.000	103.981.200.000	189%	150.000.000.000	111.400.000.000	74,26%	-	-	-
4	Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Sektor Pariwisata (%)	-	-	-	0,46	0,3185	69,24%	-	-	-
5	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%)	-	-	-	-	-	-	0,34	0,31	91,17%
6	Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Org)	-	-	-	-	-	-	25.000	28.165	112,66%
7	Meningkatnya PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB (%)	-	-	-	-	-	-	3,76	3,2	85,02%

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RENSTRA

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pariwisata dengan Target Akhir Renstra dapat dilihat sebagai berikut :

3.1.C Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra (Tahun 2029)	Tingkat Kemajuan %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%)	0,31 %	0,45 %	68,88
2.	Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	28.165	43.700	64,45
3.	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB (%)	3,20 %	4,1 %	78,05

1. Pada **Indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi,Makan dan Minum** pada tahun 2025 realisasinya adalah sebesar 0,31 % sedangkan target akhir Renstra (2026) adalah sebesar 0,45%. Hal ini menghasilkan tingkat kemajuan capaian sebesar 515 % dari target akhir Renstra dengan rincian perhitungan: $\frac{0,31}{0,45} \times 100 \% = 68,88\%$
2. Pada **Indikator Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara** tahun 2025 realisasinya adalah sebanyak 28.165 orang, sedangkan target akhir Renstra (2029) adalah sebanyak 43.700 orang. Hal ini membuat tingkat kemajuan capaian sebesar 64,45 % dari target akhir Renstra dengan rincian perhitungan : $\frac{28.165}{43.700} \times 100\% = 64,45 \%$

3. Pada **Indikator Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB ADHB** pada tahun 2025 realisasinya adalah sebesar 3,20 % sedangkan target akhir Renstra (2029) adalah sebesar 4,1%. Meskipun capaian pada tahun 2025 indikator ini menjadi yang terehdah dari ketiga IKU Dinas Pariwisata namun jika dibandingkan dengan target akhis RPJMD tahun 2029 indikator ini yang capaiannya paling tinggi yaitu tingkat kemajuan capaian sebesar **78,05 %** dari target akhir Renstra dengan rincian perhitungan :

$$\frac{3,20}{4,1} \times 100 \% = \mathbf{78,05 \%}$$

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional/Provinsi Lainnya

Untuk melakukan perbandingan antara realisasi kinerja dinas dengan standar nasional maupun provinsi lain, dibutuhkan sasaran yang sama baik di provinsi maupun sasaran nasional. Mengingat hal tersebut, maka tidak semua realisasi sasaran dapat dibandingkan dengan kondisi provinsi dan kondisi nasional.

Di tahun 2025, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang target dan realisasi capaian kinerjanya dapat dibuat perbandingan dengan target dan realisasi capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi lainnya yang mempunyai indikator kinerja yang sama, sebagaimana dapat dilihat dibawah ini:

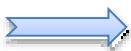
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional/Daerah Lain	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	0,31%	9,33% (DKI Jakarta)	Lebih rendah 9%
2.	Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	28.165 orang	2.027.037 Orang (Kepulauan Riau)	Lebih rendah 1.998.872

3.	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	3,20 %	6,20% (Lampung)	Lebih rendah 3 %
----	---	--	--------	-----------------	------------------

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dalam upaya mencapai target kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, tidak lepas dari adanya penyebab keberhasilan / kegagalan yang dihadapi beserta solusi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut. Secara umum pencapaian kinerja Renstra yang dibukukan tahun 2025 hasilnya baik. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja yang secara umum terkategori tinggi. Adapun **penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi** yang telah dilakukan antara lain :

1. Pada sasaran **Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum**, sampai dengan akhir tahun 2025, dapat direalisasikan sebesar **0,31%**, capaian yang dikategorikan sangat tinggi, meskipun infrastruktur pendukung pengembangan destinasi pariwisata seperti akses transportasi dan fasilitas akomodasi dapat dikatakan belum optimal, yang menyebabkan kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung lebih lama.



Sebagai wujud dari pengembangan kepariwisataan adalah terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, sarana, prasarana pada destinasi pariwisata. Di tahun 2025, dengan memaksimalkan anggaran hasil efisiensi yang masih tersedia, telah dilaksanakan pembangunan sarana prasarana di obyek wisata guna mendukung daya tarik destinasi wisata berupa gazebo yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang tentunya berdampak pula kepada peningkatan pendapatan dari sektor usaha Akomodasi, Makan dan Minum, sebagaimana tergambar dalam dokumentasi kegiatan dibawah ini :

Pembangunan 3 Unit Gazebo di Pantai Arjuna Kab. Parigi Moutong

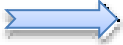


Pembangunan 6 Unit Gazebo di Permandian Desa One Pute Jaya Kab. Morowali



2. Pada sasaran **Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara**, jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara di Sulawesi Tengah yang diakumulasi sampai dengan akhir tahun 2025, dengan capaian realisasi sebanyak 28.165 kunjungan, dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Ada 5 Kabupaten/Kota sebagai penyumbang jumlah wisatawan Mancanegara terbanyak yaitu Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 8.596 orang, Kota Palu sebanyak 6.955 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 6.420 orang, Kabupaten Banggai sebanyak 2.739 orang dan Kabupaten Poso sebanyak 1.454 orang. Penyebab keberhasilan ini antara lain peningkatan promosi obyek wisata secara digital dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan kerjasama promosi melalui

event festival maupun pameran dengan pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam organisasi pelaku usaha pariwisata seperti ASITA, HPI, PHRI sebagai upaya menarik jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara. Upaya promosi juga dilakukan dengan mempublikasikan potensi daya tarik wisata Sulawesi Tengah melalui media digital baik di media sosial, website maupun video promosi.

 Untuk mendukung perluasan promosi dan pemasaran produk pariwisata pada tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dan dukungan event. Selain itu juga mengikuti kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana tergambar dalam dokumentasi kegiatan dibawah ini :

EVENT FESTIVAL RAODHAH 2025 KOTA PALU

Festival Raodha (Haul Guru Tua) adalah sebuah festival tahunan bernuansa religi, budaya dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan **Haul Guru Tua** — yaitu peringatan wafatnya ulama besar dan pendiri organisasi Islam *Alkhairaat*, **Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri** (yang dikenal sebagai *Guru Tua*). Event ini berlangsung pada tanggal 9-11 April 2025 yang berisi kegiatan :

1. Pameran kuliner, kerajinan dan *souvenir* UMKM local.
2. Penampilan seni dan budaya bernuansa Islam seperti kasidah, pembacaan puisi, atau musik islami.
3. Lomba dan kegiatan bernilai edukatif atau religius.
4. Islamic Book Fair (pameran buku Islam) dan hiburan bernuansa islami.

Festival Raodha dan Haul Guru Tua kini telah menjadi acara tahunan penting, tidak hanya untuk komunitas Alkhairaat dan umat Islam lokal, tetapi juga sebagai **event wisata religi dan budaya** yang berdampak pada ekonomi masyarakat di Kota Palu dan sekitarnya.



EVENT EFWA 2025 DI ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO, FLORENCE, ITALIA

EFWA (Eco Fashion Week Australia) adalah sebuah *fashion week* (pekan mode) berfokus pada sustainability / keberlanjutan dan mode ramah lingkungan, yang bertujuan mengubah cara pandang industri mode terhadap konsumsi, produksi dan warisan budaya tekstil. Merupakan platform untuk desainer ramah lingkungan, dengan fokus pada slow fashion (mode produksi lambat yang minim limbah dan etis), upcycling, penggunaan bahan organik/natural dan teknik handmade. Selain di Australia (terutama di Western Australia seperti Perth dan Busselton). EFWA juga telah memperluas jangkauannya ke internasional, termasuk festival dan pertunjukan di negara lain seperti **Italia**. Event ini berlangsung pada tanggal 16-18 Mei 2025. **Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah** berkolaborasi dengan **Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah** berpartisipasi

mengikuti event EFWA ini yang salah satu misinya adalah mendukung, mempromosikan dan melestarikan kerajinan tekstil tradisional (termasuk kolaborasi dengan komunitas artisanal, seperti proyek teksil ***Donggala Buya Subi*** di Indonesia).



EVENT WONDERFUL INDONESIA TOURISM FAIR (WITF) 2025 DI JAKARTA

WITF merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata RI. Kegiatan ini meliputi tradeshow Business to Business (B2B) dan mempertemukan 200 international buyers dari berbagai negara dan 250 sellers/exhibitors industri pariwisata nasional dan consumer show pameran produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam kegiatan ini Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ikut berpartisipasi dalam pendampingan dengan menghadirkan mitra usaha pariwisata yang bergerak di jasa biro perjalanan yaitu PT. Tito Journey Travel. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 9-12 Oktober 2025. Adapun paket wisata yang menjadi titik poin utama adalah berwisata ke area :

1. Taman Nasional Kepulauan Togean
2. Taman Nasional Lore Lindu

3. Kabupaten Banggai Bersaudara
4. Palu City Tour



EVENT NETWORKING OF TENUN CENTRAL SULAWESI DI DONGGALA

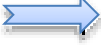
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menggelar **Event Networking of tenun Central Sulawesi**, pada tanggal 8-9 Desember 2025 bertempat di Desa Wisata Towale, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala yang dirangkaikan dengan peresmian objek wisata baru **Pantai Karampuana** sebagai destinasi pendukung Desa Wisata. Event Networking of tenun Central Sulawesi juga turut di hadiri Presiden CEO Eco Fashion Week Australia Dr. Zulhal Kuvan Mills.

Event Networking of tenun Central Sulawesi membuka peluang besar untuk kolaborasi dengan desainer, lembaga kreatif dan mitra global, acara yang diikuti 223 penenun ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif. Juga mendorong inovasi desain yang lebih digemari generasi muda, agar tenun donggala semakin adaptif terhadap kebutuhan pasar.





3. Pada sasaran **Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB**, dengan realisasi **sebesar 3,20 %** dapat dikategorikan Sangat Baik. Penyebabnya antara lain : Belum maksimalnya dukungan bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam pengelolaan manajemen, pengembangan usaha dan pemasaran hasil usaha ekonomi kreatif.

 Di tahun 2025 telah dilaksanakan pemberian bantuan berupa alat kesenian dan budaya untuk beberapa sanggar seni di Kab. Parigi Moutong, bantuan peralatan usaha kuliner di Kab. Banggai dan Kab. Donggala, promosi usaha melalui Festival Kuliner Seafood di Kab.

Banggai, juga fasilitasi pendaftaran HAKI/Merk Usaha pada Kemenkumham yang pelaksanaannya bertempat di Gedung JCC Kota Palu yang dirangkaikan dengan kegiatan Sulteng Nambaso peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Juga pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi bagi pelaku kepariwisataan dan ekonomi kreatif sebagaimana tergambar dalam dokumentasi kegiatan dibawah ini.

LOMBA EKRAF KULINER SEAFOOD DI DESA JAYA BHAKTI KEC. PAGIMANA KAB. BANGGAI

Kegiatan “Lomba Ekraf Kuliner Seafood” dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2025 bertempat di Desa Jaya Bhakti Kec.Pagimana Kab.Banggai. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pengembangan usaha kuliner berbahan dasar hasil laut yang tersedia di pesisir Desa Jaya Bhakti dan dimaksudkan dapat menjadi alternatif mata pencaharian yang tentunya diharapkan akan dapat menggerakkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.



SERTIFIKASI FOTOGRAFI DI KOTA PALU

Perkembangan Fotografi di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu ditandai dengan banyaknya jumlah pecinta fotografi, tumbuhnya komunitas fotografi serta semakin banyak digunakannya media fotografi sebagai penunjang di berbagai kegiatan. Tidak hanya dari pengguna kamera DSLR, drone, bahkan kamera smartphone yang setiap hari kita gunakan semakin banyak digemari karena mudah dibawa, serta memiliki fitur-fitur canggih dengan kualitas yang semakin mumpuni.

Menindaklanjuti perkembangan fotografi tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi Telekomunikasi Indonesia (LSP TIK Indonesia) melaksanakan kegiatan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Fotografi secara mandiri mulai tanggal 23 - 24 Juni Tahun 2025 bertempat di Sutan Raja Hotel Palu, diikuti oleh 36 peserta berasal dari perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Buol, Kabupaten Poso dan Komunitas Fotografi yang ada di Kota Palu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM bidang Fotografi yang tersertifikasi dan menghasilkan Asesor bidang Fotografi.



SERTIFIKASI PEMANDU WISATA ARUNG JERAM DI KOTA PALU

Arung jeram adalah salah satu jenis wisata petualangan yang menawarkan pengalaman seru dan menantang dengan menyusuri aliran sungai yang deras menggunakan perahu karet. Kegiatan ini sangat digemari oleh para pecinta alam dan adrenalin karena menyatukan unsur olahraga, kerja sama tim dan keindahan alam.

Untuk melakukan wisata arung jeram, memerlukan pemandu yang handal dan tersertifikasi. Pemandu arung jeram adalah profesional terlatih yang memimpin kegiatan arung jeram komersial. Mereka tidak hanya mengendalikan perahu dan navigasi jeram, tetapi juga bertanggung jawab atas keselamatan, komunikasi dengan wisatawan, serta prosedur penyelamatan darurat.

Sertifikasi arung jeram merupakan salah satu upaya peningkatan kualifikasi sumber daya manusia pariwisata petualangan, khususnya arung jeram. Sertifikasi ini bertujuan memastikan bahwa para pemandu memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional dalam rangka menjamin keselamatan dan kepuasan wisatawan.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk :

1. Meningkatkan standar keselamatan dalam kegiatan arung jeram
2. Meningkatkan profesionalisme para pemandu wisata arung jeram
3. Memberikan sertifikasi resmi sebagai bentuk pengakuan kompetensi

Kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pramuwisata Indonesia (Pramindo) dan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sulawesi Tengah, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 14 s.d 16 Juli 2025 di Hotel Jazz Palu, diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta yang merupakan pemandu wisata dari kabupaten / kota se-Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali.



SERTIFIKASI ROASTERY COFFEE DI KOTA PALU

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan LSP Pengolahan Kopi melaksanakan Kegiatan Sertifikasi Roastery Coffe dan uji kompetensi secara mandiri dan dengan dibantu oleh 2 (dua) orang asesor untuk asesmen peserta Roastery Coffee. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong adanya penambahan jumlah sumber daya manusia yang berkompeten bidang Roastery Coffee di Sulawesi Tengah. Maksud dan tujuan kegiatan sertifikasi ini adalah untuk memfasilitasi upaya peningkatan SDM yang kompetensi/berkualitas di bidang Roastery Coffee dan memberikan pembelajaran dan pengajaran terkait pengetahuan tentang cara meroastery coffee dengan baik secara profesional agar dapat menghasilkan coffee yang bagus dan mampu menyampaikan pesan-pesan didalamnya dengan baik dan mengetahui tehnik-tehnik Roastery coffe yang diterapkan langsung oleh peserta yang diharapkan dapat menjadi Seorang Roastery Coffee yang professional.

Peserta pada kegiatan ini berjumlah 25 (dua puluh lima) orang berasal dari perwakilan Komunitas Roastery yang ada di Sulawesi

Tengah dilaksanakan selama 3 (tiga hari) mulai tanggal 19-21 Agustus Tahun 2025 bertempat di Hotel Jazz Palu.





SERTIFIKASI PEMANDU WISATA GUNUNG DI KOTA PALU

Kegiatan sertifikasi pemandu wisata gunung ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pariwisata petualangan, khususnya dalam pemanduan wisata gunung. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan para pemandu memiliki kompetensi yang terstandardisasi, mampu memberikan pelayanan terbaik serta menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan selama beraktivitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing di Indonesia.

Sertifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan dan menetapkan standar kompetensi bagi para pemandu wisata gunung yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku dan sebagai wujud pengakuan atas keahlian dan profesionalitas para pemandu gunung. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pramuwisata Indonesia (Pramindo) dan Asosiasi Pemandu Wisata Gunung Indonesi (APGI) Sulawesi Tengah, berlangsung mulai tanggal 11 s.d 13 November 2025 di Hotel Khas Palu. Peserta kegiatan ini sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang merupakan pemandu wisata dari Kota Palu, Kabupaten Banggai, Morowali Utara, Parigi Moutong, Donggala dan Sigi.





F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas 2 (dua) yaitu efisiensi Sumber Daya Biaya dan Sumber Daya Manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya} \times 100\%}{\text{Target Biaya}} \right)$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja: Target	Indikator Kinerja: Realisasi	Indikator Kinerja: Capaian (%)	Anggaran: Target (Rp.)	Anggaran: Realisasi (Rp.)	Anggaran: Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	0,34%	0,31%	91,17	1.792.365.822,52	1.730.919.586	96,57	-5,40
2	Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	25.000 Orang	28.165 Orang	112,66	1.880.110.617	1.752.362.337	93,21	19,45
3	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	3,76%	3,20%	85,02	1.845.355.430	1.483.192.527	80,37	4,65

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penggunaan sumber daya biaya (realisasi anggaran) dalam rangka mendukung pelaksanaan indikator kinerja sasaran **Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** adalah sejumlah **Rp. 1.730.919.586,-** sementara target anggaran yang tersedia adalah sebesar **Rp. 1.792.365.822,52,-** maka tidak memperoleh tingkat efisiensi **-5,40 %**.
2. Penggunaan sumber daya biaya (realisasi anggaran) dalam rangka mendukung pelaksanaan indikator kinerja sasaran **Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara** adalah sejumlah **Rp. 1.752.362.337,-** sementara target anggaran yang tersedia yaitu sebesar **Rp. 1.880.110.617,-** maka diperoleh tingkat efisiensi **19,45 %**.
3. Penggunaan sumber daya biaya (realisasi anggaran) dalam rangka mendukung pelaksanaan indikator kinerja sasaran **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB** adalah sejumlah **Rp. 1.483.192.527,-** sementara target anggaran yang tersedia yaitu sebesar **Rp. 1.845.355.430,-** maka diperoleh tingkat efisiensi **4,65 %**

Berdasarkan uraian diatas, indikator kinerja **Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** tidak tercapai dikarenakan tidak

semua program yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi capaian indikator tersebut.

G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis terhadap capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja, namun terdapat pula beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian indikator tertentu.

Keberhasilan pencapaian beberapa indikator kinerja tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya tarik destinasi, kunjungan wisatawan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Selain itu, dukungan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaannya. Adapun Program yang dilaksanakan berjumlah **5 (lima) Program** dengan **16 Kegiatan** dan **36 Sub Kegiatan** yang selengkapnya akan diuraikan pada tabel berikut:

3.1.G. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (%)
1.	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama Tinggal Wisatawan	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3,75	1.792.365.823	1,54	1.730.919.586		10
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Meningkatkan Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolaannya	Daya Tarik Wisata Provinsi Yang Terstandar Pengelolaannya	DTW	1	377.702.000	1	375.960.000	1	2,15
	Perencanaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata	Dokumen	1	377.702.000	1	375.960.000	1	2,15
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah DTW di KSPP yang terstandar pengelolaannya	Jumlah DTW di KSPP yang terstandar pengelolaannya	DTW	1	738.491.299	1	687.506.064	1	3,93
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	735.891.298,50	1	684.906.064	1	3,92
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	1	2.600.000	4	2.600.000	4	0,01
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Destinasi Pariwisata Provinsi yang terstandar pengelolaannya	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang terstandar pengelolaannya	DPP	1	676.172.524	1	667.453.522	1	4
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang	Unit	1	349.392.524	1	346.387.210	1	2
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Teraksananya peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata	Orang	30	214.103.000,02	30	209.333.832	30	1,20
	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Teraksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Dokumen	1	112.677.000	1	111.732.480	1	1
2.	PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlahnya Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	5.500.000	1.478.221.150	9.240.929	1.374.290.505	3.740.929	8
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kegiatan Provinsi	2	1.478.221.150	2	1.374.290.505	2	8
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Dokumen	2	479.279.350	1	383.577.588	1	2

	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Laporan	5	998.941.800	5	990.712.917	5	6
3.	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekraf	150 M	1.257.772.122	111,4 M	Rp 1.240.827.811		7
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Pelaku Usaha Kota Kreatif yang memiliki sarana dan prasarana	Jumlah Pelaku Usaha Kota Kreatif yang memiliki sarana dan prasarana	Pelaku Ekraf	2	Rp 1.213.902.122	2	Rp 1.200.397.956	2	6,87
	Perluasan Pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Laporan	1	Rp 186.344.802	1	Rp 177.789.640	1	1,02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	2	Rp 1.025.727.320	1	Rp 1.021.166.816	2	5,84
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Laporan	1	Rp 1.830.000	1	Rp 1.441.500	1	0,01
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekraf Yang Berdaya Saing	Jumlah Pelaku Ekraf Yang Berdaya Saing	Pelaku Ekraf	75	Rp 43.870.000	75	Rp 40.429.855	75	0,23
	Perlindungan Hasil Kreatifitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas Yang Berupa Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas Yang Berupa Kekayaan Intelektual	Dokumen	1	Rp 34.870.000	1	Rp 34.429.855	1	0,20
	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Produk Hasil Pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif	Orang	18	Rp 9.000.000	12	Rp 6.000.000	12	0,03
4	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi	Orang	970	Rp 989.472.775		Rp 620.436.548		3,55
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan yang diberikan pelatihan	Jumlah Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Lanjutan yang diberikan pelatihan	Orang	190	Rp 401.889.467	190	Rp 378.071.832	190	2,16

	Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	Jumlah orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis	Orang	-	Rp	21.801.000	-	Rp	20.741.360	-	0,12
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitas berdasarkan SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitas berdasarkan SKKNI	Orang	60	Rp	380.088.467	60	Rp	357.330.472	60	2,04
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	70	Rp	587.583.308	70	Rp	242.364.716	70	1,39
	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Orang	40	Rp	443.576.905	36	Rp	103.575.566	36	0,59
	Standarisasi Usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif	Orang yang disertifikasi kompetensi di bidang ekonomi kreatif	Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi di bidang ekonomi kreatif	Orang	25	Rp	144.006.403	25	Rp	138.789.150	25	0,79
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,5	Rp	11.955.791.937		Rp	9.078.800.879		51,96
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Dokumen		Rp	477.974.850		Rp	477.659.312		2,73
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	Rp	477.974.850	7	Rp	477.659.312	7	2,73
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan, Laporan Prognosis, Laporan Simpan, Laporan Aset dan Laporan Tahunan	Tersusunnya Laporan Keuangan, Laporan Prognosis, Laporan Simpan, Laporan Aset dan Laporan Tahunan	Laporan		Rp	8.455.558.278		Rp	5.658.892.067		32,39
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	59	Rp	8.167.073.278,10	59	Rp	5.370.492.681	59	30,73
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Pengadministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Rp	130.080.000	12	Rp	130.080.000	12	0,74
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Laporan	1	Rp	158.405.000	1	Rp	158.319.386	1	0,91
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan Asset, KB dan Laporan Tahunan	Tersusunnya Laporan Asset, KB dan Laporan Tahunan	Laporan		Rp	107.507.500		Rp	107.427.500		0,61
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	Rp	107.507.500	2	Rp	107.427.500	2	0,61

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen		Rp	128.311.000		Rp	128.153.360		0,73
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Orang	104	Rp	59.800.000	104	Rp	59.800.000	104	0,34
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	Rp	65.911.000	1	Rp	65.853.360	1	0,38
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangam	Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangam	Orang	1	Rp	2.600.000	1	Rp	2.500.000	1	0,01
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Yang Tepat waktu	Tingkat Layanan Administrasi Yang Tepat waktu	Laporan		Rp	232.697.369,97		Rp	226.174.460		1,29
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	Rp	12.481.300	4	Rp	12.465.000	4	0,07
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Paket	4	Rp	80.427.730	4	Rp	80.272.405	4	0,46
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	Rp	23.411.349,97	4	Rp	23.150.412	4	0,13
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Laporan	1	Rp	116.376.990	1	Rp	110.286.643	1	0,63
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur	Laporan		Rp	52.496.600		Rp	52.451.450		0,30
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel Kebutuhan Kantor	Paket	1	Rp	32.303.600	1	Rp	32.295.450	1	0,18
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Unit	6	Rp	20.193.000	6	Rp	20.156.000	6	0,12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Yang Tepat Waktu	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Yang Tepat Waktu	Laporan		Rp	1.760.791.875		Rp	1.689.713.624		9,67
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	Rp	269.835.000	12	Rp	242.085.395	12	1,39
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	Rp	1.490.956.875	12	Rp	1.447.628.229	12	8,28

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Rp	740.454.464,30		Rp	738.329.106		4,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	Rp 236.565.850	15	Rp 235.309.106		15	1,35
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Unit	10	Rp 34.330.000	10	Rp 34.227.000		10	0,20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	3	Rp 469.558.614,30	3	Rp 468.793.000		3	2,68
			J U M L A H			17.473.623.806,89		14.045.275.329,00			80,38

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang capaian tiga (3) indikator kinerja utama yaitu : **Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum, Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB** dengan uraian sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum**, untuk sasaran indikator kinerja ini dialokasikan pada **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** yang mempunyai anggaran sebesar **Rp. 1.792.365.822,52,-** dengan realisasi keuangan mencapai **Rp. 1.730.919.586,-** atau sebesar **19,19 %** dari total pagu anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk **3 kegiatan** yaitu : **Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.**

Pada program ini terdapat rincian sub kegiatan antara lain : Penyusunan Masterplan dan DED Kepulauan Togean, pembangunan gazebo di Pantai Arjuna Kab. Parigi Moutong, pembangunan gazebo di permandian air panas Desa One Pute Jaya Kab. Morowali.

2. **Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara**, untuk sasaran indikator kinerja ini dialokasikan pada **Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** sebagai program penunjang, dengan anggaran sebesar **Rp. 1.880.110.617,-** dengan realisasi keuangan mencapai **Rp. 1.752.362.337,-** atau sebesar **19,43 %** dari total pagu anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk 2 kegiatan yaitu :

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi. Pada kegiatan ini terdapat rincian sub kegiatan antara lain : pembuatan bahan promosi berupa video destinasi wisata

di Sulawesi Tengah, mengikuti event EFWA (Eco Fashion Week Australia) yang dilaksanakan di Florence, Italia, mengikuti event Wonderfu Indonesia Tourism Fair (WITF) di Jakarta, mendukung pelaksanaan event Festival Raodha (Haul Guru Tua) di Kota Palu, menyelenggarakan event Networking of Tenun Central Sulawesi di Donggala.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan. Pada kegiatan ini terdapat rincian sub kegiatan Sertifikasi Pemandu Wisata Gunung dan Sertifikasi Pemandu Wisata Arung Jeram.

3. **Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB**, untuk sasaran indikator kinerja ini dialokasikan pada **Progam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** dan **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** sebagai program penunjang, yang mempunyai anggaran sebesar **Rp. 1.845.355.430,-** dengan realisasi keuangan mencapai **Rp. 1.483.192.527,-** atau sebesar **16,45%** dari total pagu anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk 3 kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif,
3. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, terdapat rincian sub kegiatan antara lain : Pelaksanaan Lomba Ekraf Kuliner Seafood di Kab. Banggai dan fasilitasi pendaftaran merk/ Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Palu.

Sedangkan pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif terdapat rincian sub kegiatan Sertifikasi Fotografi dan Sertifikasi Roastery Cooffee.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh alokasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan pemasaran pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

Berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun, tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat sebagian kecil anggaran yang belum dapat direalisasikan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyesuaian pelaksanaan kegiatan, maupun efisiensi belanja. Namun demikian, secara umum tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi. Ke depan, pengelolaan anggaran akan terus ditingkatkan melalui perencanaan yang lebih matang, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja sehingga pemanfaatan anggaran dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata daerah.

Dinas Pariwisata di tahun anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran dana sebesar **Rp. 17.473.623.806,89,-** yang kemudian dapat terserap sebesar **Rp. 14.045.275.329,- (80,38%)** yang diperoleh dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung realisasi anggaran. Dari capaian realisasi anggaran tersebut terdapat deviasi sebesar **19,62 %** yang berasal dari **sisa Gaji sebesar 16 %**, kemudian terdapat satu rincian kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan tusi bidang yang menyebabkan deviasi sebesar **1,95%** dan sisanya sebesar **1,67%** dari sisa-sisa belanja kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3.2 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	0,34%	0,31%	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 1.792.365.823	Rp 1.730.919.586	9,91
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Rp 377.702.000	Rp 375.960.000	
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 738.491.298,50	Rp 687.506.064	
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp 676.172.524	Rp 667.453.522	
2	Meningkatnya Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	25.000	28.165	PEMASARAN PARIWISATA	Rp 1.478.221.150	Rp 1.374.290.505	7,86
					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rp 1.478.221.150	Rp 1.374.290.505	
					PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp 1.257.772.122	Rp 1.240.827.811	7,10
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Rp 1.213.902.122	Rp 1.200.397.956	
					Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp 43.870.000	Rp 40.429.855	
3	Meningkatnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB (%)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB ADHB	3,76%	3,20%	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 989.472.775	Rp 620.436.548	3,55
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Rp 401.889.467	Rp 378.071.832	
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp 587.583.308	Rp 242.364.716	
					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 11.955.791.937,37	Rp 9.078.800.879	51,96
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 477.974.850	Rp 477.659.312	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.455.558.278,10	Rp 5.658.892.067	
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 107.507.500	Rp 107.427.500	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 128.311.000	Rp 128.153.360	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 232.697.369,97	Rp 226.174.460	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 52.496.600	Rp 52.451.450	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.760.791.875	Rp 1.689.713.624	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 740.454.464,30	Rp 738.329.106	
					J U M L A H	Rp 17.473.623.807	Rp 14.045.275.329	80,38

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Secara umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Adapun rumusan tujuan sasaran strategis pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **“Meningkatkan PDRB sektor unggulan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”**

Tujuan Sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, hampir seluruhnya telah selesai dilaksanakan dan telah berhasil dengan baik dengan capaian kinerja **80,38 %**. Proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam pencapaian kinerja, dari 4 program dan 8 kegiatan yang ditetapkan, semua telah mencapai kinerja sasaran yang diharapkan. Dari capaian tersebut, sudah sesuai dengan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian program ini adalah pada tingkat hasil (Outcome). Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran baik program maupun kegiatan.

B. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang dicapai serta agar lebih efektif pelaksanaan kegiatan yang berhubungan pada pencapaian sasaran dan strategis maka di rekomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja Aparatur maka diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap sesuai kondisi

anggaran yang dimiliki, diawali dengan penyusunan dokumen HCDP dan IPD;

2. Perlunya dukungan pengembangan destinasi dan pembangunan sarana prasarana pariwisata pada destinasi wisata prioritas yang berada di kabupaten/kota dengan memperhatikan kemampuan anggaran;
3. Penentuan target indikator pada semua sasaran agar ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana final yang telah ditetapkan sehingga tidak menyulitkan dalam pencapaian indikator;
4. Untuk program kegiatan yang dibiayai oleh pusat (APBN/Tugas Pembantuan) agar dilakukan koordinasi baik ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun ditingkat Pusat agar sinkronisasi anggaran program dengan APBD dapat direncanakan sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan bersama.


**Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah**
Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680825 199412 2 006